

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Cornelius Simanjuntak, *Oragan Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Bandung, 2009, hlm 27.

Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2007.

Hendry S Siswosoediro, *Buku Pintar Calon Anggota TNI*, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Sonhaji, *Aspek Hukum Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcing Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 36 No. 2 April-Juni 2007, hlm. 112.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, alumni Bandung, Bandung, 1991, Hal. 150.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Pontoh, Coen H. “TNI Bukan Tentara Rakyat”. Solidaritas Nusa Bangsa. Jakarta. 2000. Hal 54.

Sidratahta Mukhtar seusai, *Militer dan Demokrasi; Pemikiran Letjen (Purn) Agus Widjojo tentang Reformasi TNI dalam Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*,

Samego, Indria dkk. "Bila ABRI Berbisnis". Mizan. 1998. Hal. 100  
payaman j simanjuntak, *manajemen hubungan industrial, sinar harapan, jakarta, 2003, hal 1.*

Joko margono, *Petunjuk Pelaksanaan Good Corporate Governance Dilingkungan PT. KAI (persero)*, Divisi Grafika PT. KAI, Bandung, 2006, hlm 8.

Zainal Asikin, et.al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 33-34.

Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2.

Saksono. Slamet. *Administrasi Kepegawaian* . Kanisius. Jakarta : 1988.

Gibson, Ivancevich, Donnelly. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina Aksara. Jakarta, 1996

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang *Perkeretaapian*
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang *Apratur Sipil Negara*
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*
7. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara.*
8. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1963 Tentang *Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api.*
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1971 Tentang *Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan).*
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990 tentang *Peralihan status perusahaan dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum (perum).*
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998 tentang *pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) kereta api menjadi perusahaan perseroan (persero).*
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang *administrasi prajurit tentara nasional indonesia.*

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang *Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN*.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang *Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan perjan kepada Menteri BUMN*

### C. Sumber Lain-Lain

1. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_perkeretaapian\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia), diunduh pada Selasa 23 Februari 2016, Pukul 23.00 wib
2. [http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F\\_20150616\\_4760.PDF](http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF), Hal. 14.
3. [so45.blogspot.com/2011/08/memahami-tugas-pokok-tni.html](http://so45.blogspot.com/2011/08/memahami-tugas-pokok-tni.html).
4. PKB, antara serikat pekerja kereta api dengan management pt. kai, Bandung, 2015, hlm 20.
5. SK Direksi No.KEP.U/OT.003/VI/7/KA-2013 tentang penetapan tugas pokok dan fungsi supervisor security dan staf utama direktur utama dibidang keselamatan dan keamanan di pt.kai.
6. Sumber, Divisi SDM dan Umum PT. Kereta Api Daop 2 Bandung
7. Diungkapkan oleh Juwono dalam diskusi tentang anggaran militer yang diselenggarakan oleh LOGOS di Jakarta, 13 September 2002.